

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT 2021





**INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
PROVINSI
SULAWESI BARAT
2021**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT 2021

ISSN : 2657-0920

No. Publikasi : 76000.2201

Katalog : 4102002.76

Ukuran Buku : 17,5 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xii+53 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Dicetak oleh:

Erlangga Grafis

Sumber Ilustrasi:

Canva.com

Freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Laporan

Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi Sulawesi Barat 2021

Pengarah

Agus Gede Hendrayana Hermawan, SE, M.Si.

Editor

M La'bi, S.Si.,MM.

Penulis dan Pengolah Data

Pertiwi Tanihaha, SST.,MM.

Septika Dwi Haryati, SST.

Desain Cover

Yenni Kurnia, S.Tr.Stat.

Desain Layout

Pertiwi Tanihaha, SST.,MM

Septika Dwi Haryati, SST.

Kata Pengantar

Pembangunan manusia menjadi suatu hal yang sangat penting secara berkelanjutan. Dengan membangun manusia yang merupakan pelaku sekaligus objek pembangunan, berarti memberikan kesempatan kepada manusia untuk semakin memperluas pilihannya. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya indikator pembangunan manusia (IPM) sebagai gambaran kinerja pembangunan suatu wilayah. IPM merupakan gabungan dari tiga pendekatan dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Angka IPM disajikan pada tingkat provinsi dan kabupaten, sehingga masing-masing level pemerintahan tersebut dapat mengetahui kondisi IPMnya, baik dalam hal pencapaian maupun posisinya di antara daerah lainnya. Dengan demikian, diharapkan setiap daerah dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerja pembangunan melalui kebijakan masing-masing daerah.

Semoga publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat 2021” ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan. Tak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi hingga terbitnya publikasi ini. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi ke depan.

Mamuju, Februari 2022

**Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Barat**



Agus Gede Hendrayana Hermawan, SE, M.Si

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi

BAB 1

1 PENDAHULUAN

BAB 2

5 KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Konsep Dasar Pembangunan Manusia
Pengukuran Pembangunan Manusia
Pertumbuhan Ekonomi atau Pembangunan
Manusia yang Harus Didahulukan?
Isu Lawas Yang Selalu Hangat

BAB 3

GAMBARAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT

Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Barat
Perkembangan Komponen IPM Provinsi Sulawesi Barat

BAB 4

IPM KABUPATEN SE-SULAWESI BARAT

Perkembangan IPM Kabupaten
Perkembangan Komponen IPM Kabupaten

BAB 5

KESIMPULAN

43 DAFTAR PUSTAKA

45 CATATAN TEKNIS

27

39

Daftar Tabel

Tabel 4.1	IPM Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat serta Status Pembangunan Manusia, 2016-2021.....	30
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan IPM Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat, 2016-2021.....	31
Tabel 4.3	Umur Harapan Hidup(UHH)Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat dan Laju Pertumbuhan (persen), 2016-2021.....	33
Tabel 4.4	Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten se Sulawesi Barat dan Laju Pertumbuhan (persen), 2016-2021.....	34
Tabel 4.5	Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten se Sulawesi Barat dan Laju Pertumbuhan, 2016-2021.....	35
Tabel 4.6	Pengeluaran Per Kapita Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat dan Laju Pertumbuhan, 2016-2021.....	37
Tabel L1	Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)	51
Tabel L2	Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM.....	52

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP	10
Gambar 3.1	Tingkat Kemiskinan, Persentase Jalan Kondisi Baik, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat (persen), 2012-2021.....	18
Gambar 3.2	Perbandingan IPM Sulawesi Barat dan Indonesia, 2014-2021.....	19
Gambar 3.3	Perbandingan IPM Provinsi di Kawasan Sulampua, 2021.....	19
Gambar 3.4	Perkembangan Umur Harapan Hidup Sulawesi Barat dan Indonesia, 2016-2021.....	20
Gambar 3.5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Bersih dan Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Oleh Tenaga Medis, 2021.....	21
Gambar 3.6	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Sekolah Sulawesi Barat dan Indonesia, 2016-2021.....	22
Gambar 3.7	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Sekolah Sulawesi Barat dan Indonesia, 2016-2021.....	23
Gambar 3.8	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (Persen) Sulawesi Barat, 2016-2021.....	24
Gambar 3.9	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Penduduk Sulawesi Barat dan Indonesia, 2016-2021.....	25
Gambar 4.1	Perkembangan IPM Kabupaten se-Sulawesi Barat, 2016-2021.....	29
Gambar 4.2	Selisih Antara UHH Tertinggi dengan Terendah, 2016-2021.....	32

1

PENDAHULUAN

DIMENSI PENGUKURAN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



UMUR PANJANG DAN
HIDUP SEHAT



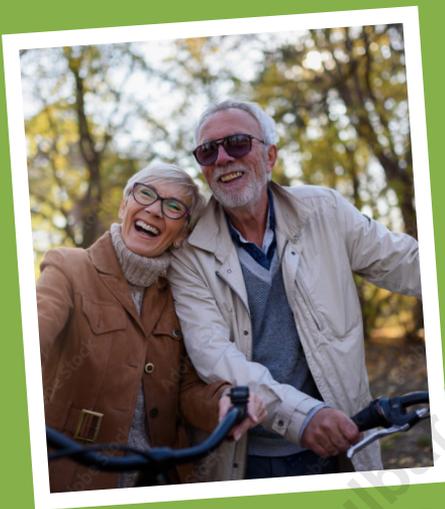
PENGETAHUAN



STANDAR HIDUP LAYAK

IPM PERTAMA KALI DIKENALKAN
TAHUN 1990 OLEH UNDP

1



PENDAHULUAN

Mengutip isi Human Development Report pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Dalam rangka memperbanyak pilihan tersebut terfokus pada tiga hal pokok, yaitu berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep ini, perbedaan cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan Produk Nasional Bruto daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. Pembangunan cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan kebutuhan dasar terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural, yang dilihat dari sudut pandang manusia. Selain itu, pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, namun juga merupakan pendekatan komprehensif dari semua sektor.

Dalam sistem pengukuran dan monitoring pembangunan manusia, idealnya mencakup banyak variabel untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Namun, terlalu banyak indikator akan memberikan gambaran yang membingungkan. Isu ini menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia dari waktu ke waktu.

Untuk pertama kalinya pengukuran pembangunan manusia diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. pengetahuan (*knowledge*); dan
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita.

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejak pertamakali diperkenalkan oleh UNDP, berbagai kritik tentang IPM terus bermunculan. Kritikan tajam muncul terutama tentang pilihan indikator, penimbang, formula agregasi, konsep dan lain sebagainya. Terlepas dari berbagai kritikan yang muncul, konsep pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh UNDP cukup mencuri perhatian media.

Popularitas pembangunan manusia cukup tinggi. Bahkan popularitasnya melampaui isu-isu pertumbuhan manusia selama 2004 hingga saat ini. Meskipun tren popularitas pembangunan manusia kian menurun, pembangunan manusia cukup dapat diterima masyarakat internasional seperti halnya pertumbuhan ekonomi.

2

KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

4

INDIKATOR PENGHITUNGAN IPM

USIA HARAPAN HIDUP (UHH)

RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

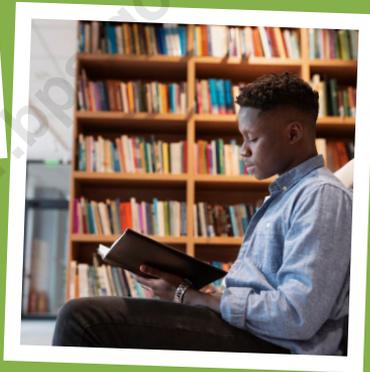
HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

PENGELUARAN PENDUDUK PER KAPITA

"Pembangunan manusia merupakan proses di mana masyarakat dapat memperluas berbagai pilihan-pilihannya"

Sumber: Badan Pusat Statistik

2



KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

KONSEP DASAR PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia sejatinya memiliki makna yang luas. Sebagaimana ide dasar pembangunan manusia itu sendiri yang meliputi pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusianya. Dimana ide dasar ini memiliki fokus kepada manusia dan kesejahteraannya. *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang (*Human Development Report 1990*).

Konsep pembangunan dan pembangunan manusia cukup berbeda. Dalam sudut pandang konvensional, pembangunan memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumberdaya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Model 'pertumbuhan ekonomi' lebih menekankan pada peningkatan pendapatan daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. 'Pembangunan sumber daya manusia' cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan 'kesejahteraan' melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan 'kebutuhan dasar' terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat – pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender.

Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Kotak 1.1 Definisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kubutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses.

Pembangunan manusia tidak hanya sebatas hal tersebut. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia.

Sumber: HDR 1990 halaman 10

Beberapa ahli juga mengemukakan konsep pembangunan manusia yang menyiratkan bahwa pembangunan manusia memiliki aspek yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan konvensional. Amartya Sen (1989) misalnya, mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan

bergantung pada faktor sosial ekonomi seperti akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Pembangunan manusia adalah cara dan tujuan akhir. Mahbub ul Haq (1995) juga mengemukakan hal serupa. Ia berpendapat bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak.

Banyak sekali konsep yang dikemukakan mengenai pembangunan manusia, sama halnya dengan makna pembangunan manusia itu sendiri. Pembangunan manusia memiliki makna yang luas mencakup kehidupan sosial manusia seperti kehidupan berpolitik. Kebebasan dan hak asasi manusia juga tercakup di dalamnya. Lebih spesifik lagi, kebebasan berpolitik adalah kemampuan untuk berkomunikasi tanpa rasa malu atau secara bebas. Pembangunan manusia juga merupakan pembangunan dari manusia dan oleh manusia (Neamtu Daniela & Ciobanu Oana, 2015).

Kotak 1.2 Kata Kunci Definisi Pembangunan Manusia

- Pembangunan manusia berarti perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat, serta perluasan kapabilitas untuk memenuhi aspirasi.
- Pembangunan manusia berarti perubahan positif pada manusia seutuhnya, fokus pada masyarakat dan kesejahteraannya, serta pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari segala macam pembangunan.

Berdasarkan beberapa konsep pembangunan manusia yang ada, UNDP mendefinisikan pembangunan manusia dalam *Human Development Report* 1996 sebagai proses di mana masyarakat dapat memperluas berbagai pilihan-pilihannya. Pendapatan merupakan salah satu faktor penentu pilihan, tetapi faktor yang lebih penting lainnya adalah kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik yang baik serta kebebasan dalam bertindak. UNDP juga menyampaikan dalam laporannya mengenai dimensi dalam pembangunan manusia, yaitu:

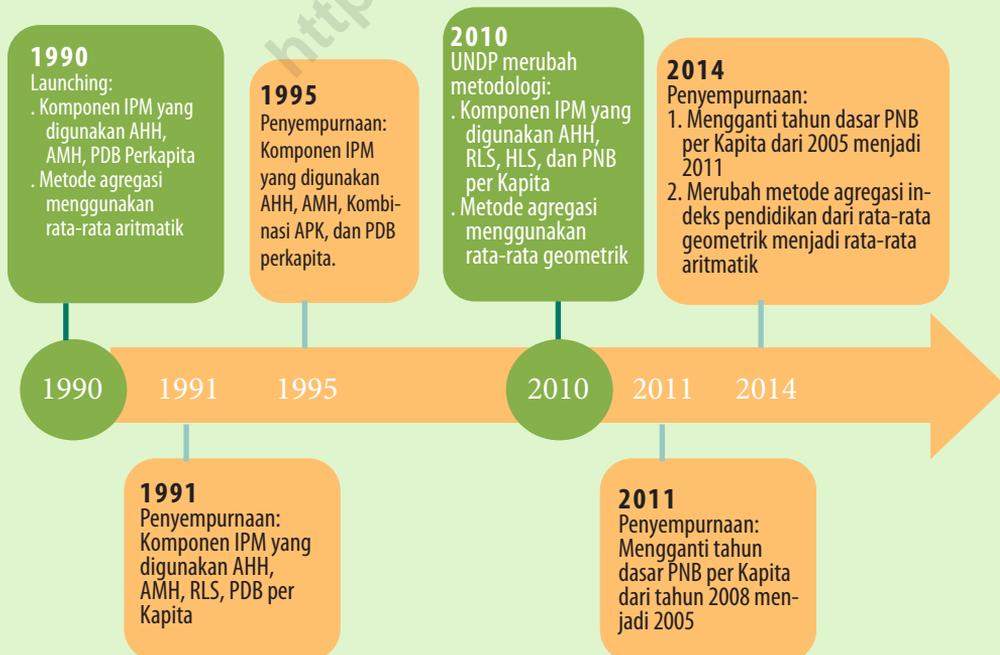
- Pemberdayaan yang dipengaruhi oleh kapabilitas, setiap orang bebas untuk melakukan sesuatu tetapi jika tidak memiliki kapabilitas maka tidak akan menikmati kebebasan tersebut.

- Dengan bekerja sama maka akan tercipta perluasan pilihan seseorang. Dengan demikian pembangunan manusia tidak hanya fokus pada individual tetapi pada bagaimana kehidupan sosialnya.
- Kesetaraan yang bermakna kesamaan peluang atau kesempatan.
- Keberlanjutan yang bermakna kesamaan peluang atau kesempatan antar generasi.
- Keamanan dari berbagai aspek tidak hanya aman dari bencana tetapi dari ancaman lainnya.

PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Gambar 1.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP



Catatan:

AHH	: Angka Harapan Hidup Saat Lahir	APK	: Angka Partisipasi Kasar
AMH	: Angka Melek Huruf	HLS	: Harapan Lama Sekolah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah	PNB	: Produk Nasional Bruto
PDB	: Produk Domestik Bruto		

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda, yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometrik. Sedangkan metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

PERTUMBUHAN EKONOMI ATAU PEMBANGUNAN MANUSIA YANG HARUS DIDAHULUKAN?

Lebih dari 25 tahun IPM digunakan UNDP sebagai pengukuran pembangunan manusia. Di Indonesia, IPM digunakan sebagai dasar penentuan dana transfer pemerintah pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kabupaten/kota. IPM yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia selama ini sebetulnya tidak sempurna seutuhnya. Banyak pihak yang menganggap pengukuran pembangunan manusia dengan menggunakan IPM ini kurang tepat. Basis ideologi dalam IPM yang bersifat egalitarian (kecenderungan cara berpikir bahwa seluruh penduduk diperlakukan oleh pemerintah ataupun mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah) dan miskin terhadap pemikiran terkait teknologi merupakan salah satu kritik untuk IPM.

Jika dikaitkan kembali antara konsep pembangunan yang masih konvensional dengan pembangunan manusia, kedua konsep tersebut ternyata saling berkaitan satu sama lain. Konsep klasik pembangunan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah (*dual causation*) (Ranis, Stewart, & Ramirez, 2000), di mana pertumbuhan ekonomi meningkatkan pembangunan manusia namun di sisi lain peningkatan pembangunan manusia memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Constantini V. dan M. Salcatore (2008) mengemukakan bahwa pertumbuhan pembangunan manusia yang

tinggi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meskipun konsep-konsep menyatakan pertumbuhan ekonomi memiliki *dual causation* dengan pembangunan manusia, pada prakteknya banyak faktor yang mempengaruhi agar *dual causation* tersebut terjadi. Boozer dkk (2003) menyatakan seberapa besar hubungan kedua bergantung kepada berbagai faktor yaitu kondisi suatu negara, lingkungan, dan kebijakan. Sedangkan Tulika dkk (2014) menyatakan hubungan pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional bergantung kepada kondisi masyarakat secara makro maupun mikro yaitu distribusi pendapatan masyarakat secara makro dan mikro.

Selain faktor yang mempengaruhi agar *dual causation* terjadi, terdapat faktor penguat hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Ranis dkk (2000) menyampaikan bahwa faktor penguat hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi adalah struktur ekonomi, distribusi aset, kebijakan, *social capital*, investasi yang tinggi, distribusi pendapatan yang merata, dan kebijakan ekonomi yang tepat. Selain itu, faktor penguat lainnya adalah budaya, kelompok sosial dan jaringan di dalam kelompok tersebut, sifat dari institusi dan pemerintahan, kebijakan, pendidikan dalam keluarga, dll (UNDP, 1996).

"Jika memang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dual causation, mana yang harus didahulukan?"

Pemikiran yang masih konvensional menyebutkan bahwa peningkatan pembangunan manusia akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi sudah meningkat (Neamtu Daniela dan Clobanu Oana, 2015). Boozer dkk (2003) mengemukakan pendapat yang hampir serupa. Pembangunan manusia bukan hanya produk dari pertumbuhan ekonomi namun merupakan input penting untuk pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia berperan penting dalam alur pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia perlu dijadikan sebagai prioritas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan manusia untuk proses selanjutnya. Dengan demikian, pembangunan manusia harus ditingkatkan terlebih dahulu daripada pertumbuhan ekonomi. Namun hal tersebut dibantah oleh Ranis dan Steward. Ranis dan Steward (2005) menyatakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia harus berjalan beriringan secara simultan.

PEMBANGUNAN MANUSIA: ISU LAWAS YANG SELALU HANGAT

Isu pembangunan kembali menghangat di tahun 2015. Pada tahun 2015,

Millenium Development Goals (MDGs) memasuki batas tahun pencapaian. MDGs merupakan referensi penting pembangunan di Indonesia. Agenda MDGs tidak akan berhenti di tahun 2015, namun akan ada kelanjutannya dengan mengembangkan konsep dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Hal ini terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya (*depletion*) sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin (Bappenas).

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator dalam pembentukan konsep pengembangan SDGs, yaitu:

1. Indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*) yaitu pendidikan dan kesehatan.
2. Indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*) yaitu ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.
3. Indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Berdasarkan ketiga pilar tersebut, dirincikan kembali ke 17 tujuan yang harus dicapai. Dalam 17 tujuan tersebut, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Lebih jauh, tujuan ketiga pada target 3A bertujuan mengakhiri kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun. Jika dikaitkan dengan salah satu indikator pembentuk IPM, angka harapan hidup saat lahir, maka secara tidak langsung akan menjadi salah satu indikator SDGs. Karena angka harapan hidup saat lahir akan meningkat jika salah satu indikator SDGs yaitu angka kematian

neonatal berhasil ditekan guna mencapai target tersebut.

Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4b, dinyatakan bahwa memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang setara, perawatan, dan pendidikan anak usia dini sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA ditingkatkan. Secara langsung, ketika target ini dicapai maka angka rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu indikator penghitungan IPM akan meningkat.

Sedangkan tujuan ke delapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam tujuan ke delapan, terdapat target 8a yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) minimal 7 persen per tahun di negara-negara berkembang. Salah satu indikator dari target ini adalah meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dengan meningkatnya PNB per Kapita, secara langsung akan menaikkan pengeluaran per kapita.

Melalui SDGs, tujuan dan target pembangunan manusia terus diupayakan peningkatannya. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia akan terus meningkat melalui pencapaian target SDGs.

3

GAMBARAN PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI BARAT

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA
SULAWESI BARAT TAHUN 2021

IPM 66,36



UHH

65,25 TAHUN

HLS

12,86 TAHUN



7,96 TAHUN

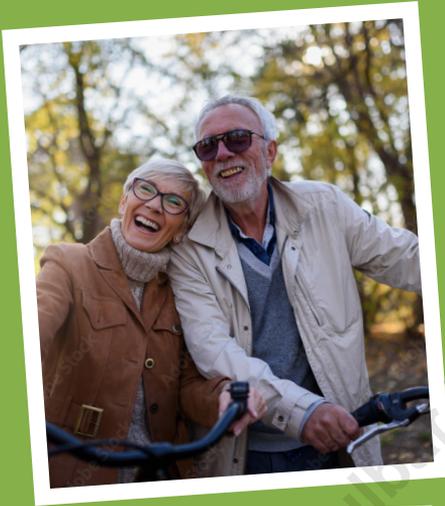
RLS



PENGELUARAN
PER KAPITA

RP. 9,153
JUTA

3



GAMBARAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT

PERKEMBANGAN IPM PROVINSI SULAWESI BARAT

Manusia adalah kekayaan bangsa yang paling utama. Pembangunan manusia menempatkan manusia bukan hanya sebagai alat dari pembangunan melainkan juga sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan. Berhasil atau tidaknya pembangunan dapat dilihat melalui indikator ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan, serta indikator lainnya. Gambaran perekonomian merupakan indikator yang paling sering digunakan sebagai pengukur keberhasilan meskipun sifatnya makro, karena indikator ini memberikan gambaran yang paling umum. Selain perkembangan perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan aspek lain sangat berkaitan dengan bagaimana masyarakat di wilayah tersebut saling berinteraksi. Perkembangan penyediaan sekaligus penggunaan sarana transportasi dan telekomunikasi pun sangat penting dalam proses pembangunan yang tengah berjalan. Salah satu komponen penting dalam pembangunan adalah fasilitas jalan, yang digunakan untuk membentuk jejaring distribusi barang maupun jasa.

Kondisi geografi Provinsi Sulawesi Barat yang berupa bukit dan deretan pegunungan menunjukkan aksesibilitas utama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain adalah melalui jalur darat. Pembukaan jalan baru dan peningkatan kualitas jalan mutlak diperlukan untuk meningkatkan arus distribusi barang dan jasa. Hingga 2021, panjang jalan yang membentang di Sulawesi Barat mencapai 5.820,29 Km mencakup jalan negara, provinsi dan kabupaten. Ruas jalan kabupaten dengan kondisi baik tercatat sepanjang 1.404,24 Km atau sekitar 29,45 persen.

Peningkatan jalan baik dari panjang jalan maupun kualitasnya pada umumnya akan sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian di Sulawesi Barat. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,56 persen. Kondisi ini sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar 2,42 persen sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Meskipun tumbuh, perekonomian Provinsi Sulawesi Barat belum pulih seperti sebelum adanya pandemi yang dapat tumbuh di kisaran lima bahkan hampir delapan persen. Dampak negatif

dari adanya pandemi COVID-19 masih dirasakan, namun pada tahun 2021 ini mulai bangkit kembali sehingga perekonomian dapat tumbuh positif meskipun belum normal.

Persentase penduduk miskin sebesar 13,01 persen pada tahun 2012 menurun hingga mencapai 10,95 persen di tahun 2019. Namun, adanya pandemi COVID-19 membuat tren kemiskinan kembali meningkat. Di awal pandemi tahun 2020, tingkat kemiskinan tercatat meningkat sebesar 0,55 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan kembali mengalami peningkatan sebesar 0,35 persen dibanding tahun sebelumnya. Dua tahun dilanda pandemi, tingkat kemiskinan Sulawesi Barat tahun 2021 menunjukkan angka tertinggi selama enam tahun terakhir. Dengan mulai bangkitnya perekonomian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif, diharapkan dapat membuat tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat semakin mengikis. Sehingga pembangunan manusia pun dapat semakin meningkat.

Gambar 3.1
Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sulawesi Barat (persen), 2012-2021



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Pembangunan manusia yang telah diupayakan sejak terbentuknya Sulawesi Barat tahun 2004 silam menunjukkan dampak yang cukup berarti. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan IPM dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, capaian IPM Sulawesi Barat sebesar 62,24. Capaian ini masih jauh dari kondisi nasional yang pada saat itu telah mencapai

68,90. Artinya, masih terdapat ketimpangan antara capaian IPM Sulawesi Barat dan nasional sebesar 6,66 poin. Hingga tahun 2021, selisih capaian ini perlahan menyempit hingga menyentuh level 5 poin, dengan angka Sulawesi Barat mencapai 66,36 dan Indonesia sebesar 72,29. Kondisi yang cukup menggembirakan adalah pergerakan IPM Sulawesi Barat sedikit lebih cepat dari Indonesia. Pada kurun waktu 2014-2021, IPM Sulawesi Barat meningkat 4,12 poin sementara IPM Indonesia hanya mampu meningkat 3,39 poin seperti terlihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2.
Perbandingan IPM Sulawesi Barat dan Indonesia, 2014-2021

Sumber :
BPS Provinsi Sulawesi Barat



Untuk kawasan Sulampua, capaian IPM cukup bervariasi dengan rentang nilai 60,62 hingga 73,30. IPM Sulawesi Utara yang sebesar 73,30 menempati posisi tertinggi, kemudian diikuti oleh IPM Sulawesi Selatan 72,24. Dari sepuluh provinsi di kawasan sulampua, IPM terendah yaitu di Papua sebesar 60,62. Adapun Sulawesi Barat masih berada pada urutan ke delapan yaitu sebesar 66,36. Dari tahun 2014 hingga kondisi 2017, pencapaian IPM masih menyisakan Papua sebagai daerah dengan IPM kategori rendah. Sedangkan di tahun 2018-2021, IPM Papua sudah memasuki kategori sedang namun dengan selisih yang cukup jauh dari provinsi lain. Perhatian yang serius dibutuhkan oleh pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Papua pada khususnya, tentunya tanpa mengesampingkan pembangunan manusia di daerah lain. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3
Perbandingan IPM Provinsi di kawasan Sulampua, 2021

Sumber :
BPS Provinsi Sulawesi Barat



PERKEMBANGAN KOMPONEN IPM SULAWESI BARAT

Umur Harapan Hidup Saat Lahir

Umur harapan hidup saat lahir merupakan manifestasi dari indikator kesehatan penduduk. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Ada banyak hal yang dapat menjadi faktor tingginya umur harapan hidup, seperti kondisi sosial ekonomi, perilaku hidup sehat dan lain sebagainya.

Gambar 3.4 Perkembangan Umur Harapan Hidup Sulawesi Barat dan Indonesia, 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Capaian umur harapan hidup di Sulawesi Barat meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, umur harapan hidup Sulawesi Barat sebesar 64,31 tahun. Namun capaian ini masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan UHH Indonesia yang sudah mencapai 70,90 tahun. Hingga tahun 2021 capaian Sulawesi Barat masih lebih rendah dari capaian nasional. UHH Sulawesi Barat tahun 2021 meningkat menjadi 65,25 tahun namun masih tertinggal dari capaian UHH Indonesia yang sebesar 71,57 tahun. Perlahan namun pasti pergerakan UHH Sulawesi Barat semakin mendekati UHH Indonesia. Hal ini ditandai dari selisih capaian UHH Sulawesi Barat dengan UHH Indonesia yang semakin mengecil dari tahun ke tahun. Selisih UHH Sulawesi Barat dengan Indonesia di tahun 2016 sebesar 6,59 tahun kemudian menurun menjadi 6,32 tahun di tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Peningkatan derajat kesehatan penduduk Sulawesi Barat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat itu sendiri untuk dapat berperilaku hidup sehat dengan tetap memelihara lingkungan sekitar. Seperti yang dikemukakan oleh Henrik L. Blum (www.depkes.go.id) bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang adalah faktor lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa lingkungan yang baik akan mendorong secara langsung peningkatan derajat kesehatan dan secara tidak langsung akan berhubungan dengan keturunan dan pelayanan masyarakat.

Salah satu faktor lingkungan adalah aksesibilitas terhadap air minum layak. Air minum layak merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang penggunaannya nyaris dibutuhkan dalam setiap aktivitas kehidupan. Oleh karena itu, konsumsi air layak sudah tidak dapat dihindarkan. Pada tahun 2021, rumah tangga yang sudah memiliki akses air minum layak di Sulawesi Barat mencapai 78,35 persen. Kabupaten Mamasa memiliki akses air minum layak yang terendah yaitu hanya sebesar 31,51 persen. Sementara Majene memiliki akses air minum layak tertinggi yang mencapai 94,06 persen. Dibutuhkan perhatian pemerintah untuk mempermudah akses air minum layak penduduk di Provinsi Sulawesi Barat, utamanya di daerah Mamasa.

Gambar 3.5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak dan Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Oleh Tenaga Medis, 2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Faktor yang sangat menentukan angka harapan hidup disamping pemenuhan gizinya adalah tenaga penolong kelahiran dari seorang anak lahir hidup. Tenaga yang dimaksud adalah sumber daya yang memiliki keterampilan dalam hal persalinan baik dari segi pengalaman maupun pengetahuan bidang tersebut.

Saat ini, perempuan usia subur yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir dengan penolong terakhir pada proses kelahirannya ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, perawat) sudah cukup banyak. Berdasarkan data Susenas 2021 angka tersebut mencapai 91,28 persen. Tingginya angka tersebut didorong adanya aturan yang mengharuskan kelahiran di puskesmas sebagai syarat diberikannya akte kelahiran. Jika ditinjau berdasarkan kabupaten, penolong persalinan terakhir perempuan usia subur yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir di Sulawesi Barat masih bervariasi mulai dari 82,85 persen (Mamasa) hingga 99,16 persen (Pasangkayu). Diharapkan dengan makin meningkatnya pemanfaatan tenaga medis dalam proses persalinan, dapat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat ke depannya. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi setiap penduduk Indonesia. Bahkan dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia, pendidikan menjadi salah satu poin yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Gambar 3.6 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Sekolah Sulawesi Barat dan Indonesia, 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Tolok ukur kinerja pendidikan digambarkan oleh harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). HLS dan RLS merupakan angka yang digunakan untuk menggambarkan kesempatan yang dimiliki dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan yang berkualitas di jenjang formal. HLS Sulawesi Barat pada tahun 2016 mencapai 12,34 tahun. Angka ini mengartikan bahwa setiap anak yang memasuki usia tujuh tahun diharapkan akan menempuh pendidikan 12,34 tahun dalam kehidupannya. Kondisi ini sedikit lebih rendah dari capaian Indonesia pada tahun yang sama yang sudah mencapai 12,72 tahun. Posisi Sulawesi Barat sedikit tertinggal dibanding kondisi secara nasional. Pada tahun 2021 HLS Indonesia sudah menyentuh level 13 tahun sedangkan Sulawesi Barat sebesar 12,86 tahun (lebih rendah 0,22 tahun). Selama kurun waktu 2016-2021 selisih HLS Indonesia dan Sulawesi Barat paling besar terjadi di tahun 2016 yang sebesar 0,38 tahun. Hal yang menggembirakan dari pergerakan HLS Sulawesi Barat adalah jarak antara capaian HLS Sulawesi Barat dan HLS Indonesia semakin mengecil sehingga kondisi 2021 selisihnya hanya terpaut 0,22 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.6.

Gambar 3.7 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Sekolah Sulawesi Barat dan Indonesia, 2016-2021

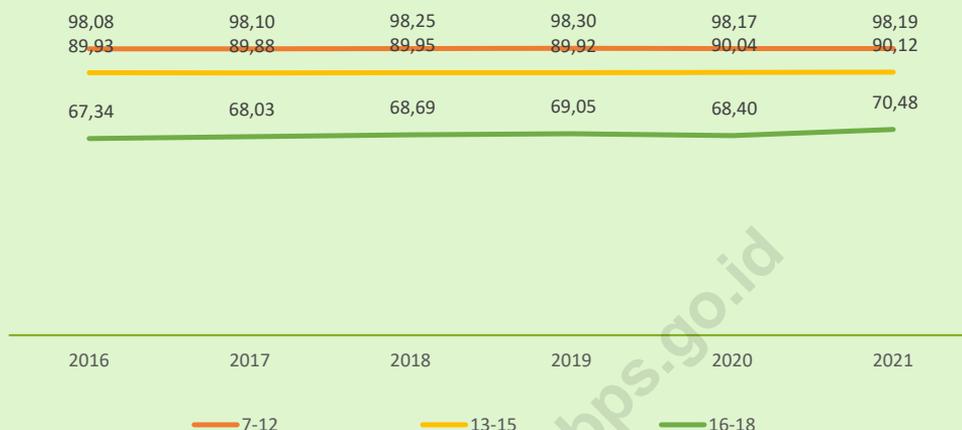


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Indikator pendidikan lainnya yang menggambarkan derajat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). Capaian RLS Sulawesi Barat juga masih tertinggal dari capaian nasional. Pada tahun 2016, RLS Sulawesi Barat sebesar 7,14 tahun, atau 0,81 tahun di bawah capaian Indonesia. Posisi tersebut masih berlangsung hingga 2021, di mana RLS Indonesia mencapai 8,54 tahun sedangkan RLS Sulawesi Barat lebih rendah 0,58 tahun yaitu 7,96 tahun. Indikator pembangunan manusia Sulawesi Barat pada kategori ini sedikit lebih cepat dari pergerakan Indonesia. Hal ini tercermin dari peningkatan RLS Indonesia yang sebesar 0,59 tahun pada kurun waktu

2016-2021 sementara Sulawesi Barat mencapai 0,82 tahun. Pergerakan RLS Sulawesi Barat dan Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3.8 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (Persen) Sulawesi Barat, 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Indikator lain yang menunjukkan pergerakan searah dengan HLS dan RLS adalah angka partisipasi sekolah (APS). APS yang ditekankan adalah cakupan pendidikan formal. Secara umum APS di Sulawesi Barat menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2016-2021. APS usia 7-12 tahun meningkat dari 98,08 persen menjadi 98,19 persen di tahun 2021, Sementara APS usia 13-15 tahun meningkat sebesar 0,19 poin dari 89,93 persen di tahun 2016 menjadi 90,12 persen di tahun 2021. Yang menarik dicermati dari posisi APS pada usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yaitu keduanya belum mencapai 100 persen, artinya adalah belum dirasakannya pendidikan dasar yang formal untuk semua kalangan di Sulawesi Barat. Penduduk pada kelompok usia tersebut seharusnya menikmati level pendidikan dasar yang sudah dari dulu diwajibkan sembilan tahun. Beragam program pendidikan dicanangkan untuk memperluas cakupan pendidikan formal. Di antaranya yaitu program untuk memberantas buta aksara, menekan angka putus sekolah melalui pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) serta menjamin kesempatan untuk memperoleh pendidikan melalui program penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Sedangkan upaya yang dilakukan di Sulawesi Barat adalah program mengembalikan anak yang sudah terlanjur putus sekolah untuk tetap melanjutkan pendidikan.

Kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi tercermin pada kelompok umur 16-18 tahun. APS pada kelompok umur ini meningkat dari 67,34 persen pada tahun 2016 menjadi 70,48 persen di tahun 2021. Atau meningkat 3,14 persen poin selama lima tahun terakhir. Peningkatan yang cukup besar ini disinyalir sejalan dengan aktivitas ekonomi di Sulawesi Barat yang semakin meningkat. Banyak lapangan kerja yang tersedia, yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA/ sederajat. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.8.

Standar Hidup Layak

Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian. Standar hidup layak ini diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita per tahun yang kemudian disesuaikan dengan *purchasing power parity* (PPP). Indikator ini menggambarkan daya beli selama periode tertentu.

Gambar 3.9 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Penduduk Sulawesi Barat dan Indonesia, 2016-2021 (dalam 000 rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian Sulawesi Barat, penduduk Sulawesi Barat memiliki kemampuan secara ekonomi yang semakin meningkat pula. Hal ini ditunjukkan oleh pergerakan pengeluaran per kapita Sulawesi Barat yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi pergerakannya sedikit lebih lambat dari pengeluaran per kapita Indonesia. Namun, lagi-lagi pandemi COVID-19 memberikan tantangan pada pencapaian pembangunan manusia. Adanya kontraksi

pertumbuhan ekonomi, membuat pengeluaran per kapita penduduk Sulawesi Barat mengalami penurunan.

Selama kurun waktu 2016 hingga 2017 pengeluaran per kapita Sulawesi Barat masih berada di sekitar Rp. 8.000.000 per tahun. Tahun 2018, pengeluaran per kapita penduduk Sulawesi Barat mulai bergerak tumbuh mencapai Rp. 9.000.000 per tahun. Sedangkan Indonesia beranjak dari kisaran Rp. 10.000.000 menuju kisaran Rp. 11.000.000. Peningkatan pengeluaran per kapita penduduk Sulawesi Barat maupun nasional terus terjadi hingga tahun 2019. Namun, adanya pandemi COVID-19 membuat pengeluaran per kapita nasional maupun Sulawesi Barat mengalami penurunan. Tahun 2020 pengeluaran per kapita Sulawesi Barat tercatat turun sebesar Rp. 67.000, sementara di tahun 2021 sebesar Rp. 15.000 di bandingkan tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.9.

<https://sulbar.bps.go.id>

4

IPM KABUPATEN SE SULAWESI BARAT



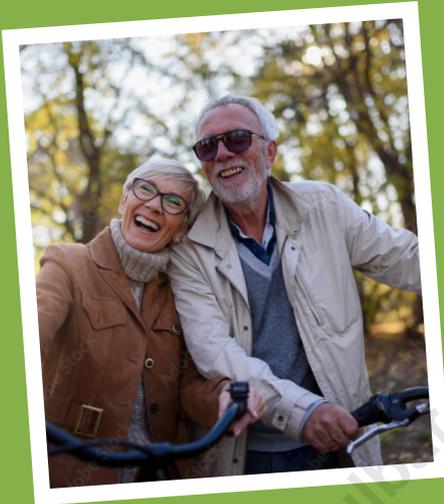
Provinsi Sulawesi Barat,
Kabupaten Majene, Polewali
Mandar, Mamasa, Mamuju,
Pasangkayu, Mamuju Tengah

IPM 66,36
Tahun 2021

Tumbuh 0,38 persen
Dibandingkan Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

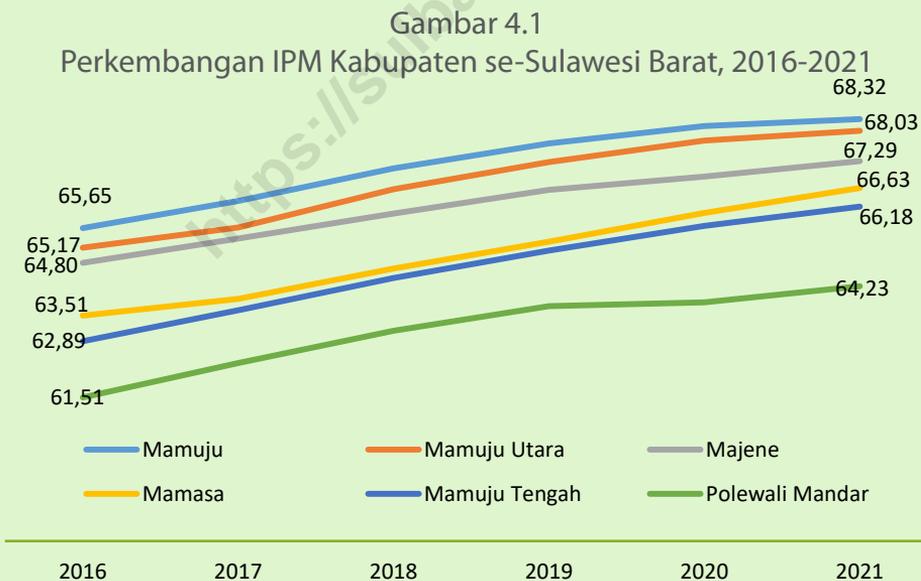
4



IPM KABUPATEN SE SULAWESI BARAT

PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN

Pembangunan terus bergulir dari waktu ke waktu dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Pada hakikatnya pembangunan harus bersifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi. Namun, kemajuan pembangunan manusia yang berbeda telah melahirkan kesenjangan pembangunan. Setiap daerah melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan entitas/lembaga masing-masing. Daerah atau kawasan yang relatif lambat perkembangannya mengalami berbagai kesulitan dan akan membuat daerah atau kawasan tersebut semakin tertinggal dari daerah atau kawasan yang lain. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dalam mengatasi kesenjangan tersebut.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Kesenjangan pembangunan manusia antar provinsi maupun kabupaten/kota sangat menarik untuk dibahas. Seperti terlihat pada gambar di atas, terdapat ketimpangan capaian IPM antar kabupaten di Sulawesi Barat. Polewali Mandar menempati posisi terendah capaian IPM.

Tabel 4.1 IPM Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat serta Status Pembangunan Manusia, 2016-2021

Prov./Kab.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SULAWESI BARAT	63,60	64,30	65,10	65,73	66,11	66,36
Majene	64,80	65,40	66,01	66,59	66,91	67,29
Polewali Mandar	61,51	62,35	63,14	63,74	63,84	64,23
Mamasa	63,51	63,92	64,66	65,32	66,02	66,63
Mamuju	65,65	66,32	67,11	67,72	68,15	68,32
Pasangkayu	65,17	65,67	66,60	67,27	67,79	68,03
Mamuju Tengah	62,89	63,64	64,43	65,10	65,71	66,18

Catatan:
 Kategori IPM menurut UNDP
 IPM < 60 : rendah
 60 ≤ IPM < 70 : sedang
 70 ≤ IPM < 80 : tinggi
 IPM > 80 : sangat tinggi

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Selama kurun waktu enam tahun terakhir (2016-2021), capaian pembangunan manusia di tingkat provinsi maupun kabupaten di Sulawesi Barat terus membaik. Di tingkat provinsi, capaian IPM pada tahun 2016 di posisi 63,60 dengan capaian tersebut Sulawesi Barat sudah berstatus pembangunan manusia “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Demikian halnya di tingkat kabupaten, seluruh kabupaten sudah berstatus pembangunan manusia “sedang”. Polewali Mandar adalah kabupaten yang baru memasuki kelompok pembangunan manusia “sedang” di tahun 2014 silam.

Pada tahun-tahun selanjutnya, IPM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten mengalami peningkatan. Namun sayangnya peningkatan besaran IPM baik provinsi maupun kabupaten belum bisa meningkatkan status pembangunan manusia Sulawesi Barat menjadi “tinggi”. Meskipun demikian, IPM Sulawesi Barat di tahun 2021 mencapai 66,36 dengan variasi capaian pembangunan manusia di kabupaten berkisar antara 64,23

(Kabupaten Polewali Mandar) dan 68,32 (Kabupaten Mamuju). Selama kurun waktu 2016-2021 nampak Kabupaten Mamuju selalu memiliki capaian IPM lebih tinggi dibandingkan capaian Sulawesi Barat. Sebaliknya Kabupaten Polewali Mandar memiliki IPM lebih rendah dari capaian Sulawesi Barat sekaligus menjadi IPM terendah di antara lima kabupaten lainnya.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa untuk tahun 2021, laju pertumbuhan IPM tertinggi adalah di Kabupaten Mamasa, sementara terendah di Kabupaten Mamuju. Capaian IPM diharapkan dapat terus tumbuh, sehingga target SDGs pun dapat tercapai utamanya yang terkait dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Sementara tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Terakhir, tujuan kedelapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan layak untuk semua.

Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan IPM Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat, 2016-2021

Prov./Kab.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SULAWESI BARAT	1,02	1,10	1,24	0,97	0,58	0,38
Majene	0,62	0,93	0,93	0,88	0,48	0,57
Polewali Mandar	1,05	1,37	1,27	0,95	0,16	0,61
Mamasa	0,54	0,65	1,16	1,02	1,07	0,92
Mamuju	0,86	1,02	1,19	0,91	0,63	0,25
Pasangkayu	0,74	0,77	1,42	1,01	0,77	0,35
Mamuju Tengah	1,08	1,19	1,24	1,04	0,94	0,72

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Laju pertumbuhan IPM per tahun juga digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan pembangunan manusia dalam suatu kurun waktu. Semakin tinggi nilai pertumbuhannya, semakin cepat IPM suatu wilayah mencapai kondisi maksimalnya. Dalam menganalisis IPM, hal yang menarik untuk diangkat adalah kecepatan pertumbuhannya. Pada

beberapa kasus, wilayah yang memiliki IPM rendah justru terkadang menunjukkan prestasi yang baik dengan laju pertumbuhan IPM yang tinggi. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat pada kabupaten yang memiliki predikat sebagai “top movers” di tahun 2021 yaitu Mamasa dengan angka pertumbuhan IPM hampir mencapai level satu.

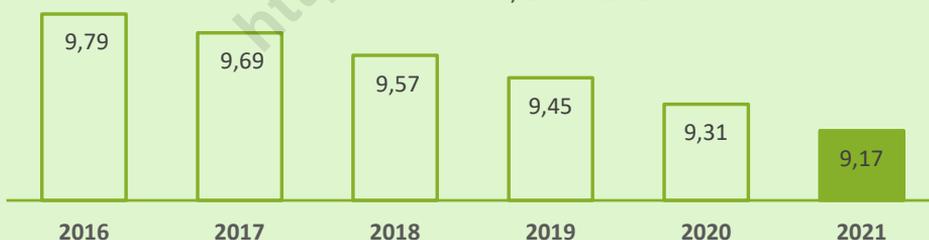
PERKEMBANGAN KOMPONEN-KOMPONEN IPM KABUPATEN

Peningkatan IPM seluruh kabupaten di Sulawesi Barat selama 2016-2021 tidak terlepas dari peningkatan yang terjadi pada komponen-komponen pembentuk IPMnya. Secara umum, semua komponen pembentuk IPM di semua kabupaten di Sulawesi Barat mengalami peningkatan. Namun besarnya peningkatan dalam satu komponen di setiap kabupaten satu dengan yang lain bervariasi. Hal inilah kemudian yang menjadikan ada beberapa kabupaten yang secara peringkat mengalami pergeseran.

Dimensi Kesehatan

Dalam dimensi kesehatan, seiring dengan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Barat, kesenjangan kesehatan antar kabupaten pun semakin mengecil. Hal ini dapat dilihat melalui jarak antara UHH tertinggi dengan UHH terendah.

Gambar 4.2 Selisih Antara UHH Tertinggi dengan Terendah di Sulawesi Barat, 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2016 kesenjangan UHH antar kabupaten sebesar 9,79 tahun. Kemudian kesenjangan UHH tersebut dari tahun ke tahun kian menurun hingga posisi terakhir tahun 2021 kesenjangan UHH sebesar 9,17 tahun. Namun, kesenjangan UHH ini tergolong masih tinggi. Kesenjangan Sulawesi Barat diukur melalui capaian UHH yang terendah, yaitu pada Kabupaten Majene, dan UHH tertinggi yaitu Kabupaten Mamasa. Untuk enam tahun terakhir, kesenjangan masih sama yaitu diukur melalui dua kabupaten tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa posisi capaian

UHH terendah dan tertinggi tidak mengalami perubahan selama enam tahun terakhir.

Tabel 4.3 Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat dan Laju Pertumbuhan (persen), 2016-2021

Prov./Kab.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sulawesi Barat	64,31 (0,13)	64,34 (0,05)	64,58 (0,37)	64,82 (0,37)	65,06 (0,37)	65,25 (0,29)
Majene	60,64 (0,22)	60,79 (0,25)	61,05 (0,43)	61,30 (0,41)	61,56 (0,42)	61,77 (0,34)
Polewali Mandar	61,65 (0,18)	61,76 (0,18)	61,97 (0,34)	62,18 (0,34)	62,38 (0,32)	62,53 (0,24)
Mamasa	70,43 (0,08)	70,48 (0,07)	70,62 (0,20)	70,75 (0,18)	70,87 (0,17)	70,94 (0,10)
Mamuju	66,51 (0,20)	66,65 (0,21)	66,94 (0,44)	67,23 (0,43)	67,52 (0,43)	67,77 (0,37)
Pasangkayu	65,13 (0,31)	65,33 (0,31)	65,62 (0,44)	65,91 (0,44)	66,20 (0,44)	66,45 (0,38)
Mamuju Tengah	67,36 (0,24)	67,52 (0,24)	67,79 (0,40)	68,06 (0,40)	68,33 (0,40)	68,55 (0,32)

Catatan : Angka dalam tanda kurung merupakan angka laju pertumbuhan dalam persen
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Kondisi dimensi kesehatan pada level kabupaten cukup bervariasi. UHH tertinggi saat lahir tahun 2021 ditempati oleh Kabupaten Mamasa dengan capaian sebesar 70,94 tahun. Di sisi lain, Kabupaten Majene masih berada di posisi terendah dengan UHH saat lahir sebesar 61,77 tahun. Meskipun Kabupaten Majene berada di posisi terendah, pertumbuhan UHH saat lahir selama tahun 2018-2020 di Kabupaten Majene cukup tinggi (di atas 0,40 persen) dan menempati posisi ke-3 setelah pertumbuhan UHH saat lahir Kabupaten Pasangkayu (0,44 persen) dan Mamuju (0,43 persen).

Namun, di tahun 2021 pertumbuhan UHH mengalami perlambatan di seluruh kabupaten se Sulawesi Barat dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 0,38 persen. Rata-rata pertumbuhan UHH saat lahir kabupaten di Sulawesi Barat tahun 2021 hanya sebesar 0,29 persen menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,37 persen. Kabupaten Pasangkayu masih mengalami peningkatan paling tinggi sejak tahun 2016 hingga 2021.

Sebaliknya Kabupaten Mamasa justru mengalami perlambatan sejak tahun 2018 hingga 2021.

Dimensi Pendidikan

Seiring dengan membaiknya kualitas kesehatan, perkembangan pendidikan di Sulawesi Barat juga menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Pada level kabupaten, kondisi pendidikan tidak jauh berbeda dengan kondisi pendidikan provinsi. Seluruh kabupaten mengalami kenaikan capaian baik angka harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2021, angka harapan lama sekolah tertinggi dicapai oleh Kabupaten Majene dengan capaian sebesar 13,62 tahun, sedangkan Kabupaten Pasangkayu dengan capaian terendah yaitu 11,95 tahun. Selisih antara angka tertinggi dan terendah relatif kecil, yakni pada kisaran angka 1 hingga 2 tahun, tren ini semakin menyempit setiap tahunnya. Hingga tahun 2021, selisih angka tertinggi dan terendah sebesar 1,67 tahun. Dengan menyempitnya selisih capaian angka harapan lama sekolah, menunjukkan pembangunan pendidikan antar kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat selama kurun waktu 2016 hingga 2021 semakin merata.

Tabel 4.4 Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten se Sulawesi Barat dan Laju Pertumbuhan (persen), 2016-2021

Prov./Kab.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sulawesi Barat	12,34 (1,01)	12,48 (1,13)	12,59 (0,88)	12,62 (0,24)	12,77 (1,19)	12,86 (0,70)
Majene	13,54 (0,18)	13,57 (0,22)	13,58 (0,07)	13,60 (0,15)	13,61 (0,07)	13,62 (0,07)
Polewali Mandar	12,96 (1,02)	13,01 (0,39)	13,02 (0,08)	13,05 (0,23)	13,06 (0,08)	13,38 (2,45)
Mamasa	11,36 (0,43)	11,41 (0,44)	11,58 (1,49)	11,74 (1,38)	12,05 (2,64)	12,36 (2,57)
Mamuju	12,97 (0,12)	13,13 (1,23)	13,14 (0,08)	13,18 (0,30)	13,19 (0,08)	13,24 (0,38)
Pasangkayu	11,27 (0,55)	11,37 (0,89)	11,59 (1,93)	11,66 (0,60)	11,93 (2,32)	11,95 (0,17)
Mamuju Tengah	11,49 (1,15)	11,57 (0,70)	11,71 (1,21)	11,92 (1,79)	12,23 (2,60)	12,53 (2,45)

Catatan : Angka dalam tanda kurung merupakan angka laju pertumbuhan dalam persen
 Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Pertumbuhan angka harapan lama sekolah tahun 2020-2021 di level kabupaten cukup beragam. Tiga kabupaten mengalami percepatan dalam capaian angka harapan lama sekolah sementara tiga kabupaten lain mengalami perlambatan. Kabupaten yang mengalami perlambatan adalah Mamasa, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah. Dari enam kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa tumbuh paling cepat dibandingkan kabupaten lainnya dengan pertumbuhan sebesar 2,57 persen.

Indikator kedua yaitu rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator *output* pendidikan. Kabupaten Majene masih menempati rata-rata lama sekolah tertinggi dengan capaian sebesar 8,91 Tahun. Capaian Kabupaten Majene sebagai daerah dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tertinggi selama enam tahun terakhir semakin memperjelas eksistensi Kabupaten Majene sebagai daerah pendidikan di Sulawesi Barat. Kondisi tersebut sudah sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang di Sulawesi Barat di mana pembangunan Kabupaten Majene diarahkan pada pengembangan pusat pendidikan pada semua level pendidikan.

Tabel 4.5 Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten se Sulawesi Barat dan Laju Pertumbuhan, 2016-2021

Prov./Kab.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sulawesi Barat	7,14 (2,91)	7,31 (2,38)	7,50 (2,60)	7,73 (3,07)	7,89 (2,07)	7,96 (0,89)
Majene	7,81 (0,94)	8,14 (4,23)	8,25 (1,35)	8,52 (3,27)	8,65 (1,53)	8,91 (3,01)
Polewali Mandar	6,89 (1,78)	7,09 (2,90)	7,24 (2,12)	7,40 (2,21)	7,41 (0,14)	7,44 (0,40)
Mamasa	6,98 (0,86)	7,10 (1,72)	7,22 (1,69)	7,37 (2,08)	7,65 (3,80)	7,88 (3,01)
Mamuju	7,21 (3,87)	7,26 (0,69)	7,53 (3,72)	7,69 (2,12)	7,95 (3,38)	7,96 (0,13)
Pasangkayu	7,47 (2,30)	7,48 (0,13)	7,68 (2,67)	7,92 (3,13)	7,98 (0,76)	8,09 (1,38)
Mamuju Tengah	7,10 (3,50)	7,13 (0,42)	7,23 (1,40)	7,24 (0,14)	7,46 (3,04)	7,51 (0,67)

Catatan : Angka dalam tanda kurung merupakan angka laju pertumbuhan dalam persen
 Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Pertumbuhan rata-rata lama sekolah tahun 2020-2021 di level kabupaten cukup beragam. Terdapat tiga Kabupaten yang mengalami perlambatan dalam pencapaian rata-rata lama sekolah yaitu Kabupaten Mamasa, Mamuju, dan Mamuju Tengah. Pada tahun 2021 kecepatan pertumbuhan rata-rata lama sekolah Kabupaten Majene meningkat pesat dibandingkan tahun 2020 yang hanya 1,53 persen. Kabupaten Mamuju menjadi kabupaten dengan pertumbuhan terlambat pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,13 persen padahal tahun sebelumnya Kabupaten Mamuju mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup yang layak menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini merupakan representasi kesejahteraan yang diproksi melalui indikator pengeluaran per kapita. Secara umum, selama kurun waktu 2016-2019 pengeluaran per kapita penduduk di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk di Sulawesi Barat semakin membaik. Namun, pada tahun 2020 tren ini mengalami perlambatan, bahkan beberapa kabupaten mengalami kontraksi, begitu pun di tahun 2021 sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir.

Kabupaten Pasangkayu masih memiliki jumlah pengeluaran per kapita tertinggi sejak 2016 hingga tahun 2021. Jumlah pengeluaran per kapita Kabupaten Pasangkayu di tahun 2021 mencapai Rp 11.072.000 per tahun. Kemudian Kabupaten Majene menempati urutan kedua dengan capaian pengeluaran per kapita sebesar Rp 10.028.000 per tahun. Di sisi lain, Kabupaten Mamasa masih berada di posisi terendah dengan pengeluaran per kapita sebesar Rp 7.736.000 per tahun. Kondisi ini tetap sama sejak tahun 2016 hingga 2021.

Hampir seluruh kabupaten mengalami kontraksi pertumbuhan pengeluaran perkapita pada tahun 2020, sementara tahun 2021 seluruh kabupaten mengalami kontraksi. Oleh karena itu, secara agregat pertumbuhan pengeluaran per kapita Sulawesi Barat juga terkontraksi sebesar 0,16 persen pada tahun 2021, meningkat dibanding tahun 2020 yang terkontraksi 0,73 persen. Pada tahun 2021, Kabupaten Polewali Mandar mengalami penurunan sebesar 0,37 persen dan menjadi kabupaten dengan penurunan yang terbesar.

Tabel 4.6 Pengeluaran Per Kapita (dalam ribu rupiah) Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat dan Laju Pertumbuhan, 2016-2021

Prov./Kab.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sulawesi Barat	8 450 (2,30)	8 736 (3,38)	9 051 (3,61)	9 235 (2,03)	9 168 (-0,73)	9 153 (-0,16)
Majene	9 441 (2,32)	9 559 (1,25)	9 904 (3,61)	10 029 (1,26)	10 056 (0,27)	10 028 (-0,28)
Polewali Mandar	7 559 (3,12)	7 947 (5,13)	8 355 (5,13)	8 598 (2,91)	8 580 (-0,21)	8 548 (-0,37)
Mamasa	7 231 (1,81)	7 353 (1,69)	7 597 (3,32)	7 769 (2,26)	7 747 (-0,28)	7 736 (-0,14)
Mamuju	8 689 (1,55)	9 019 (3,80)	9 308 (3,20)	9 535 (2,44)	9 500 (-0,37)	9 494 (-0,06)
Pasangkayu	10 264 (1,12)	10 577 (3,05)	10 915 (3,20)	11 094 (1,64)	11 111 (0,15)	11 072 (-0,35)
Mamuju Tengah	7 521 (1,58)	7 931 (5,45)	8 243 (3,93)	8 501 (3,13)	8 414 (-1,02)	8 408 (-0,07)

Catatan : Angka dalam tanda kurung merupakan angka laju pertumbuhan dalam persen,
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

KESIMPULAN



KOMPONEN IPM

Seluruhnya mengalami peningkatan, kecuali ekonomi

CAPAIAN IPM

Tahun 2021, capaian IPM tertinggi ialah Kabupaten Mamuju



KOMPONEN EKONOMI

Melalui indikator pengeluaran per kapita penduduk

Mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan pandemi COVID-19

TREN PEMBANGUNAN MANUSIA

Meningkat dari tahun ke tahun



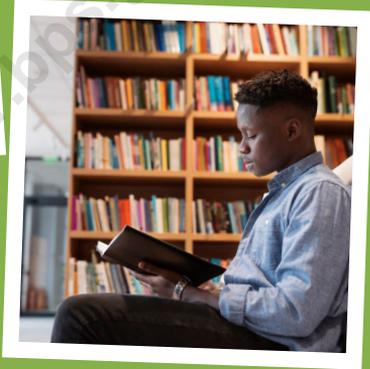
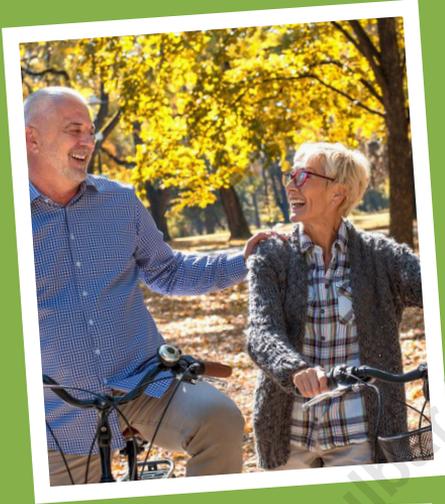
PERTUMBUHAN IPM

Tahun 2021, pertumbuhan IPM tertinggi ialah Kabupaten Mamasa

Sementara pertumbuhan IPM terendah ialah Kabupaten Mamuju



5



KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), baik tren 2016-2021 maupun spasialnya didapat beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Tren pembangunan manusia di Sulawesi Barat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan juga terjadi di tahun 2021. Capaian IPM Sulawesi Barat pada tahun 2021 adalah 66,36 dengan pertumbuhan sebesar 0,38 persen dari tahun 2020.
2. Peningkatan terjadi pada seluruh komponen IPM, kecuali komponen ekonomi, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Komponen kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya Umur harapan hidup menjadi 65,25 tahun di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 65,06 tahun (tumbuh 0,29 persen).
 - Komponen pendidikan dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi 12,86 tahun (tumbuh 0,70 persen), dan rata-rata lama sekolah menjadi 7,96 tahun (tumbuh 0,89 persen) dibanding tahun 2020.
 - Komponen ekonomi menurun yang ditunjukkan oleh penurunan pengeluaran per kapita per tahun menjadi Rp. 9.153.000 pada tahun 2021 (turun 0,16 persen) dibanding tahun 2020.
3. Capaian IPM pada tahun 2021 tertinggi di level kabupaten diraih oleh Kabupaten Mamuju dengan IPM sebesar 68,32 dan capaian terendah IPM berada di Kabupaten Polewali Mandar dengan capaian 64,23.
4. Indikator umur harapan hidup pada tahun 2021 tertinggi dicapai Kabupaten Mamasa (70,94 tahun), dan terendah Kabupaten Majene (61,77 tahun).
5. Indikator angka harapan lama sekolah pada tahun 2021 tertinggi dicapai Kabupaten Majene (13,62 tahun) dan terendah Kabupaten Pasangkayu (11,95 tahun).
6. Indikator rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 tertinggi juga dicapai oleh Kabupaten Majene (8,91 tahun) dan terendah Kabupaten Polewali Mandar (7,44 tahun).

7. Indikator pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2021 tertinggi dicapai oleh Kabupaten Pasangkayu (Rp. 11.072.000) dan terendah Kabupaten Mamasa (Rp. 7.736.000).
8. Pertumbuhan capaian IPM tahun 2021 tertinggi pada level kabupaten yaitu Kabupaten Mamasa dengan pertumbuhan sebesar 0,92 persen sedangkan Kabupaten Mamuju memiliki pertumbuhan paling rendah dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,25 persen.

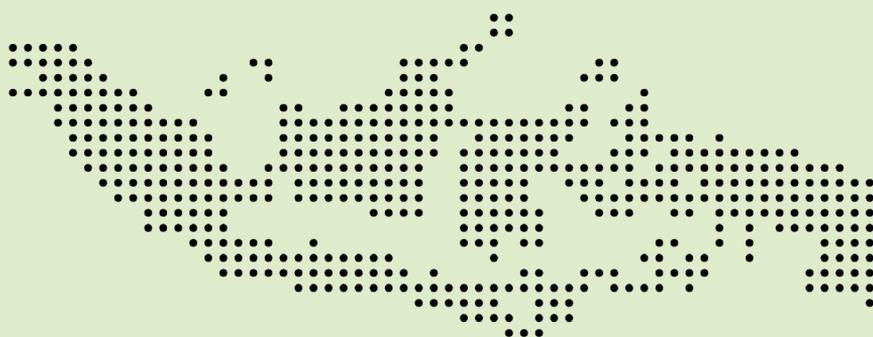
<https://sulbar.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015. Indeks Pembangunan Manusia 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2019. Indeks Pembangunan Manusia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- United Nations Development Programme. 1990. Human Development Report. New York: UNDP.
- _____. 1996. Human Development Report. New York: UNDP.
- _____. 2015. Human Development Report. New York: UNDP.



CATATAN TEKNIS



<https://sulbar.bps.go.id>

CATATAN TEKNIS

KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.”

Kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia – yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan.

Konsep ini terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Mengutip isi HDR pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup layak. Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep ini, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai

cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi.

Model ‘pertumbuhan ekonomi’ lebih menekankan pada peningkatan PNB daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. ‘Pembangunan sumber daya manusia’ cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi – sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan ‘kesejahteraan’ melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan ‘kebutuhan dasar’ terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat – pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural – dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Umur Harapan Hidup saat Lahir

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan

asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Penghitungan Umur harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston , 2004).

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup

layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*). Dalam penghitungan standar hidup layak digunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m} \quad (1)$$

Keterangan:

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j

p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel L1. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel L2. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Tabel L1. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/singkong	Minyak Kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya (batu baterai, aki, korek, obat nyamuk, dll)
Daging sapi	Mie Instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Transportasi/pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos da Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikan (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan rumah tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Rokok kretek filter	Alat-alat dapur/makan

PENYUSUNAN INDEKS IPM

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}} \quad (3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}} \quad (4)$$

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \quad (5)$$

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) + \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) + \ln(\text{pengeluaran}_{\min})} \quad (6)$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel L2.

Tabel L2. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \quad (7)$$

STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok "sangat tinggi": $IPM \geq 80$
2. Kelompok "tinggi": $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok "sedang": $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok "rendah": $IPM < 60$

PERTUMBUHAN IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**
Jl. RE. Martadinata No. 10 Mamuju, Sulawesi Barat
Telp./Fax: (0426) 2703340
Email : sulbar@bps.go.id
Homepage : sulbar.bps.go.id

ISSN 2657-0920



9 772657 092004